
Pengoptimasian Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan (Studi Pada Kelompok Tani di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat)

**Ronaldo C. Porajow¹
Sofia E. Pangemanan²
Donald K. Monintja³**

ABSTRAK

Pembangunan desa yang berkelanjutan akan menjadikan sebuah desa berkembang dalam segala aspek, pembangunan kelembagaan di desa juga mestinya penting untuk diperhatikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, yaitu pengamatan langsung atau observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, Dalam kapasitas sebagai pemimpin politik yang ada di desa Ranolambot, keberadaan pemerintah desa belum menunjukkan perannya dalam mendorong dan memaksimalkan keberadaan kelompok tani. Program yang dilaksanakan oleh desa yang telah disahkan lewat APBDes menunjukkan bahwa secara program untuk keberadaan kelompok tani kurang diperhatikan. Pada akhirnya apa yang menjadi hasil pertanian dari kelompok tani, proses mekanisme antisipatifnya tidak kelihatan. Sebagaimana upaya memaksimalkan hasil pertanian maka sangat penting untuk dibuatkan aturan agar dalam penyusunan APBDes program kelompok tani dimasukkan dalam APBDes.

Kata Kunci: Pengoptimasian, Kelembagaan, Pembangunan Desa

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Merujuk pada keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Maka lembaga kemasyarakatan merupakan suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan yang berpola guna memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan bersama, dimana lembaga kemasyarakatan harus mempunyai sistem norma yang mengatur tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam hal pemenuhan kebutuhan, proses ini tersebut tak lepas dari fungsi pemerintah yang memberdayakan, dan dilamnya meliputi mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Lembaga sosial memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Secara umum dalam suatu masyarakat, khususnya negara, lembaga-lembaga yang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat adalah lembaga pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, dan keluarga. Namun, dalam penelitian ini penulis akan lebih banyak mengupas tentang lembaga pemerintahan desa yang terkait dengan pembangunan desa. Sebab, lembaga pemerintahan ini memiliki peran yang penting bagi masyarakat desa Ranolambot.

Kelembagaan yang ada di desa khususnya keberadaan kelompok tani, nampaknya belum menunjukkan keseriusan pemerintah desa untuk menjadi tiang dalam proses pembangunan yang ada didesa. Hal ini sangat terlihat betapa minimnya sarana dalam penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa. Seperti ketersediaan pupuk bagi petani, akses hasil panen ke pembeli, dan

ketersediaan anggaran dalam menunjang jalannya kelompok tani.

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Kelompok Tani, Dasawisma, Rukun Warga. Padahal jauh sebelumnya setiap desa memiliki lembaga-lembaga lokal yang tumbuh dari masyarakat. Di era Reformasi, pengaturan kelembagaan masyarakat tidak lagi bersifat seragam, meski tetap membuat standar seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan PKK. Berbagai lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai wadah organisasi kepentingan masyarakat setempat, termasuk untuk kepentingan ketahanan sosial (social security) masyarakat, dan menyokong daya tahan Ekonomi warga (economic survival).

Di desa Ranolambot khususnya dalam pembangunan. Pada dasarnya dana desa tidak hanya diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur semata, namun juga untuk program kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat menjadi penting diperhatikan dan dilaksanakan supaya pembangunan merata. Pembangunan yang melibatkan semua unsur desa diharapkan tepat sasaran karena dikerjakan masyarakat setempat. Pembangunan yang dilakukan melalui dana desa pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Akan tetapi tingkat efektifitas dari pembangunan masih belum teruji manfaatnya karena infrastruktur yang dibangun masih ada yang belum difungsikan secara tepat. Hal ini dapat merugikan masyarakat itu sendiri karena tidak dapat digunakan oleh masyarakat hasil dari pembangunan tersebut.

Dari beberapa persoalan yang terungkap di atas maka bila di indentifikasi masalahnya terlihat ada beberapa masalah yang meninjol diantaranya, beberapa orang yang mengikuti kegiatan kelembagaan kelompok tani kurang memahami mengenai kelompok tani, apalagi bila disinggung mengenai tujuan dan manfaat kelompok tani. Selanjutnya mengenai keseriusan pemerintah desa dalam memperhatikan keberadaan

kelompok tani. Dan hampir disetiap, persoalan, masalah sumber daya manusia juga menghiasi keberadaan kelompok tani.

Tinjauan Pustaka Pemerintah Desa

Pemerintah Desa atau di singkat pemdes adalah Lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Definisi tersebut memuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo, (1981:63) mendefinisikan pembangunan desa sebagai berikut: "Pembangunan Desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa."

Pembangunan Desa

Pembangunan desa harus menyangkut semua pihak dari tingkat pusat hingga daerah, pembangunan yang pertama harus dibina dan dikembangkan adalah desa. Perkataan "desa" menurut Suhardjo Kartohadikusumo dan Hatta Sastra Mihardja, (1987: modul 22) adalah berasal dari perkataan "sanskrit" yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.

Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan

bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Menurut Suparno (2001 : 46) mengatakan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Pengertian sederhana yaitu pemerintah sudah menyediakan segala sarana kebutuhan masyarakat, tinggal bagaimana masyarakat menggunakan atau menjalankannya.

Menurut (Ahmadi 2001:222) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah disatu pihak. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan pembinaan, dan pengawasan.

Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, (1983:251) yaitu: 1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat. 2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat. 3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan. 4. Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan

desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.

Tugas dan Fungsi Kelembagaan Desa

Tugas : Lembaga-lembaga yang dibentuk di Desa Ranolambot yaitu: 1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif 2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif 3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotongroyong dan swadaya masyarakat pemberdayaan masyarakat.

Menurut Anantanyu, Tahun 2011 Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga mempunyai fungsi.

Fungsi: Dalam kelembagaan yang dibentuk di Desa adalah bagaimana masyarakat mamahami bagaimana proses tujuan pembentukan kelembagaan di Desa dan menjadi pedoman anggota masyarakat yang mengikuti organisasi kelembagaan Desa untuk mengatasi permasalahan khususnya dalam Pembangunan di Desa. Salah satu contoh kelembagaan dalam Berkelompok Tani mempunyai manfaat yaitu: 1) Memepererat Kebersamaan 2) Saling Belajar 3) Saling Membantu 4) Belajar mendengar pendapat orang lain 5) Belajar menyampaikan Saran 6) Belajar memimpin dan Bertanggungjawab 7) Meningkatkan kerja sama.

Utami, Molo, Widiyanti (2011) menyatakan bahwa kelembagaan dari aspek formal merupakan gambaran/deskripsi potret dari aspek regulative institusi formal yang terdiri dari batas yuridiksi, peraturan, sanksi dan monitoring. Kelembagaan menyediakan pedoman dan sumber daya untuk bertindak, sekaligus batasan-batasan dan hambatan untuk bertindak. Fungsi kelembagaan adalah untuk tercapainya stabilitas dan keteraturan.

Kelembagaan Desa

Menurut Nugroho, Tahun 2010 Kelembagaan diartikan sebagai aturan main, norma-norma, larangan-larangan, kontrak,kebijakan dan peraturan atau perundangan yang mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat atau organisasi untuk mengurangi ketidak pastian dalam mengontrol.

Menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga Desa yakni : 1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa); 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 3. Lembaga kemasyarakatan; 4. Lembaga Adat; 5. Kerjasama Antar Desa; dan 6. Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).

Namun masih ada beberapa kelembagaan lokal yang dibentuk didesa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan barat. Karena dalam menyelenggarakan pembangunan desa mendayagunakan lembaga-lembaga seperti yang tertulis diatas untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Utami, Molo, Widiyanti (2011) menyatakan bahwa kelembagaan dari aspek formal merupakan gambaran deskripsi potret dari aspek regulative institusi formal yang terdiri dari batas yuridiksi, peraturan, sanksi dan monitoring. Kelembagaan menyediakan pedoman dan sumber daya untuk bertindak, sekaligus batasan-batasan dan hambatan untuk bertindak. Fungsi kelembagaan adalah untuk tercapainya stabilitas dan keteraturan.

Dalam perspektif teori pemerintahan setiap negara, apapun bentuk negara tersebut, memiliki fungsi-fungsi tertentu sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks ini, Menurut Pratiknyo (2006), terdapat tiga fungsi yang di miliki oleh negara yaitu; fungsi pelayanan publik (public services), fungsi pembangunan/kesejahteraan (welfare), dan fungsi pengaturan/keteraturan (governability). Untuk melaksanakan ketiga fungsi ini agar lebih efektif dan efisien, maka pemerintah pusat perlu

melakukan transfer atau memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah (daerah). Menurut Litvack dan Seddon (1999) Transfer atau pemberian dan memberikan kewenangan serta tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah tingkat yang lebih rendah dalam hal ini daerah di disebut atau dinamakan dengan desentralisasi. Cheema dan Rondinelli (1981) mengartikan desentralisasi sebagai "transfer of political power". Transfer kewenangan atau pembagian kekuasaan ini terjadi dalam perencanaan pemerintah, pengambilan keputusan dan administrasi dari pemerintah pusat ke unit-unit organisasi lapangannya, unit-unit pemerintah daerah, organisasi setengah pemerintah daerah dan non pemerintah daerah.

Menurut Bryant dan White (1987), Desentralisasi diartikan sebagai transfer kekuasaan/kewenangan yang dapat dibedakan ke dalam desentralisasi administratif maupun desentralisasi politik. Desentralisasi administratif adalah pendelegasian wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat daerah, sedangkan desentralisasi politik adalah pemberian kewenangan dalam membuat keputusan dan pengawasan tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan daerah. Berbagai konsep dan model tentang desentralisasi tidak juga dilepaskan dari berjalannya proses demokrasi dalam proses pemerintahan, seperti yang di ungkapkan dan ditegaskan Imawan (2005) dan Rasyd (2007).

Eko (2003) bahwa hasil antara desentralisasi dan demokratisasi melahirkan konsep model Otonomi Daerah Berbasis Masyarakat (ODBM), yang mana dengan Otonomi Daerah Berbasis Masyarakat adalah otonomi yang dibingkai dengan demokrasi dan demokrasi berbasis kepada partisipasi masyarakat.

Metode Penelitian

Menurut Darmadi (2013:153), Metode penelitian deskriptif kualitatif

adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu, penelitian ini menggunakan responden sebagai sumber informasi utama yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan indikator variabel penelitian.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan peneliti : a. Observasi/Pengamatan Yaitu pengamatan yang dilakukan langsung pada objek yang diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang akan mendukung dalam penelitian. b. Kuesioner atau Angket 28 Yaitu mengajukan pertanyaan tertulis yang dilengkapi dengan alternatif jawaban dalam bentuk pertanyaan tertutup. c. Wawancara Yaitu langsung meneliti dengan menemui responden, dimana responden diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan peneliti. Wawancara dilakukan untuk mendalami suatu permasalahan yang menurut peneliti perlu penjelasan lebih lanjut.

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Pengoptimasian Kelembagaan Desa dalam Pembangunan Desa. Studi di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. Dalam penelitian deskriptif Adapun menurut Arikunto (2006:79) Dalam menganalisa data penelitian penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif atau disebut juga analisis isi (Content analysis).

Adapun Pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah: 1. Hukum Tua 2. BPD 3. Kelompok Tani 4. Masyarakat/Tokoh Agama

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan baik itu dalam tahapan pengamatan sementara maupun pada saat berada dilapangan bersamaan dengan telah dilakukan penelitian di Desa Ranolambot maka diperoleh hasil penelitian dengan rujukan teorinya pada teori Cheema dan Rondinelli, yang menyebutkan ada beberapa faktor yang dipakai dalam membedah persoalan.

Adapun faktor faktor tersebut adalah : Pemimpin Politik, Birokrasi, Sumberdaya dan Anggaran. Dari beberapa faktor tersebut, maka peneliti memulai hasil penelitiannya dari faktor pertama, yakni :

1. Aspek Pemimpin Politik

Terkait dengan aspek kepemimpinan kepala daerah maka dalam menurut Sarundajang (2005) mengungkapkan bahwa Kepala Daerah adalah posisi sentral 35 dan strategis dalam sistem Pemerintahan Daerah. Begitu strategisnya kedudukan dan peran Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan Daerah, sehingga seorang Kepala Daerah harus menerapkan pola kegiatan yang dinamik, aktif, kreatif, serta komunikatif, menerapkan pola kekuasaan yang tepat maupun pola perilaku kepemimpinan yang sesuai tuntutan kebutuhan yang dipengaruhi oleh latar belakang individual masing-masing Kepala Daerah. Dalam hubungan dengan hal tersebut Menurut Kaloh (2003): Kepala daerah harus mampu mengelola kewenangan yang diterima secara efektif dan efisien demi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat daerah. Cara pandang yang demikian inilah yang tepat untuk menjelaskan hubungan antara Kepala Daerah dan otonomi daerah. Eforia reformas yang menggulirkan perubahan dimana wacana, demokratisasi dan transparansi terus tumbuh dan berkembang dengan cepat.

Sehubungan dengan keberadaan kepala daerah maka untuk kepemimpinan yang ada di desa ada kesamaannya dengan keinginan politik. Menurut Schiffman dan Kanuk (2008:72) menyatakan kata keinginan merupakan landasan bagi individu untuk melakukan sesuatu atau sama dengan hasrat memiliki sesuatu, dengan keinginan dan hasrat maka timbulah motivasi. Berkaitan dengan motivasi, memang tak bisa dibantah bahwa setiap manusia memiliki motivasi.

Sesuai dengan fakta yang ada di lapangan di dapati bahwa kepemimpinan desa yang ada di Ranolambot terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani, belum sepenuhnya di ketahui secara langsung.

Menurut Hukum Tua Desa Ranolambot, khusus untuk keberadaan kelompok tani, secara pemerintahan memang ada, karena secara administrasi pemerintahan, terdaftar dan ada di desa ini. Namun, bila menyangkut urusan ke dalam, maksudnya kegiatan apa yang dilakukan kelompok tani, wilayah itu ada pada kelompok tani. Ditambahkannya juga, bahwa kelompok tani di desa ini, banyak mendapatkan bantuan, apakah itu dari ketersediaan bibit untuk keperluan perkebunan dan juga beberapa bantuan seperti sapi untuk ditenakkan. Namun, secara khusus untuk pengaturannya ada 38 pada ketua kelompok tani, karna memang kalau kami, maksudnya pemerintahan desa mau masuk ke urusan mereka kelompok tani, posisi kami dianggap melanggar, oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut, kami hanya pada posisi koordinasi. Saat ditanyakan berapa bantuan per kelompok tani dari pemerintah pusat lewat dinas pertanian provinsi Sulut dan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa, menurutnya, memang ada bantuan keuangan, tapi keuangan tersebut langsung kepada kelompok tani, jadi posisi kami hanya menghimbau agar penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan atau peruntukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan untuk kepemimpinan hukum tua di desa Ranolambot bila melihat konsepnya Mustakim (2014) bahwa kepemimpinan itu harus ada Inovatif-Prograsif, maksudnya sebagai pemerintahan desa, mestinya secara kepemimpinan harus paling tahu segala dinamika yang ada di desa, termasuk di dalamnya keberadaa kelompok tani. Bila melihat hasil wawancara dan fakta-fakta di lapangan, dapat disimpulkan peran hukum tua tidak terlalu nampak.

2. Dukungan Program

Menurut Jones (1984), program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan

itu sendiri. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Menurut Dye (1992), kebijakan atau yang dalam hal ini adalah kebijakan publik.

Berdasarkan observasi di lapangan didapati, secara pemerintahan keberadaan kelompok tani memang diakui terdaftar secara administrasi. Namun menyangkut pelaksanaan program dari pemerintah desa, hanya melakukan kegiatan yang insidental, artinya tidak terprogram. "Sepanjang pemerintahan yang ada di desa Ranolambot, belum ada anggaran yang diberikan oleh desa kepada kelompok tani, apalagi dengan adanya dana desa sekarang ini," kata AW anggota kelompok tani. Menurutnya, secara ideal mestinya ada anggaran untuk kelompok tani karena keberadaan masyarakat di Ranolambot didominasi penduduknya sebagai petani.

Dalam pengamatan di lapangan juga didapati bahwa keberadaan petani cap tikus juga banyak di desa Ranolambot, karena memang di desa ini dari observasi di beberapa tempat/kebun warga banyak sekali ditumbuhi pohon enau atau bagi masyarakat lebih dikenal dengan pohon seho. Dalam kaitannya dengan petani cap tikus, menurut AT tokoh masyarakat Ranolambot menyatakan, dalam beberapa desa yang dia kunjungi ada dana desa yang digerakkan lewat BUMDES dalam artian pemerintah desa peduli dengan keberadaan hasil-hasil pertanian termasuk di dalamnya keberadaan cap tikus. Namun, fakta di lapangan keberadaan petani cap tikus justru dianggap biang masalah di kampung, padahal bila dikelola dengan baik kesejahteraan petani bisa nampak.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara sekaligus dengan rujukan teorinya maka dapat disimpulkan program yang dilaksanakan para kelompok tani, belum disusun dengan sistematis dalam penyusunan APBDes. Kondisi ini menunjukkan pemerintah desa belum memprioritaskan kelompok tani di desa Ranolambot khususnya untuk dukungan programnya.

3. Dukungan Birokrasi

Menurut Kettner (2002), terdapat tiga pertimbangan yang diambil dalam teori birokrasi yaitu pertama: Tanggungjawab, kedua hierarki dan ketiga regulasi, manakala yang ketiga. Instrumen ini adalah kekuatan kepada teori birokrasi.

Menurut Weber (1948), Pengertian Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan.

Menurut Gibson (1984) mengungkapkan bahwa: Perilaku birokrasi pemerintah merupakan interaksi antara individu dalam organisasi serta lingkungannya, karena perilaku birokrasi ditentukan oleh fungsi individu dalam lingkungan organisasi atau perilaku birokrasi sama dengan fungsi pribadi atau individu dalam lingkungan organisasi. Dari berbagai pandangan yang disampaikan baik itu Kettner (2002), Weber (1948) dalam pemahaman peneliti pandangan Kettner (2002) yang tepat untuk membedah masalah birokrasi. Adapun konsepnya adalah: Hirarki, Tanggungjawab, Regulasi.

Hasil pengamatan menunjukkan keberadaan kelompok tani di desa Ranolambot, dalam mekanisme birokrasi terdaftar secara administrasi. Kondisi menunjukkan bahwa keberadaan kelompok tani di desa ini, diperhatikan. Menurut RL salah satu aparatur pemerintahan desa mengungkapkan, "Segala persyaratan 43 yang menjadi dasar berdirinya kelompok tani tetap kami tunjang, artinya apa saja yang menjadi persyaratan administrasi, sedapat mungkin kami percepat".

Ditambahkannya, penting untuk ada koordinasi dengan pemerintah desa agar bisa diatur keberadaan kelompok taninya. Sebab bisa saja dalam proses pendaftaran anggota kelompok tani ada nama ganda. Jadi, pekerjaan kami sesuai dengan keberadaan struktur desa, artinya hukum tua yang secara hirarki menjadi pemimpin kami, untuk pekerjaan ini kami lakukan dengan bertanggungjawab, karena memang sesuai dengan dasar hukum.

Dari berbagai gambaran di atas, maka sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan, dukungan birokrasi untuk keberadaan kelompok tani dari pemerintah desa tidak ada persoalan

Penutup

Kesimpulan

1. Dalam kapasitas sebagai pemimpin politik yang ada di desa Ranolambot, keberadaan pemerintah desa belum menunjukkan perannya dalam mendorong dan memaksimalkan keberadaan kelompok tani.
2. Program yang dilaksanakan oleh desa yang telah disahkan lewat APBDes menunjukkan bahwa secara program untuk keberadaan kelompok tani kurang diperhatikan. Pada akhirnya apa yang menjadi hasil pertanian dari kelompok tani, proses mekanisme antisipatifnya tidak kelihatan.
3. Dalam dukungan birokrasi, keberadaan kelompok tani dijamin pemerintah desa dalam sisi administrasinya. Soal dukungan personil kepada kelompok tani banyak kali terabaikan.

Saran

1. Harus ada mekanisme khusus tentang keberadaan Hukum Tua untuk lebih memprioritaskan keberadaan kelompok tani. Proses yang terjadi keberadaan pemimpin desa kurang antusias dalam mengurus kelompok tani.
2. Sebagaimana upaya memaksimalkan hasil pertanian maka sangat penting untuk dibuatkan aturan agar dalam penyusunan APBDes program kelompok tani dimasukkan dalam APBDes.
3. Keberadaan birokrasi dalam memenuhi kebutuhan kelompok tani penting untuk dipertahankan, hal ini untuk menjaga proses pengurusan kelompok tani di kemudian hari..

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian*. Jakarta Rineka Cipta.
- B.C. Smith, 1985, *Decentralization: The Territorial Dimension Of The State*, George Allen, Unwin London

Chema and Rondinelly 1983, *Desentralitation and Development, Policy Implementation indeveloping countries*. Sage Publication

Creswell, John. W., 2013. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. Terjemahan: Nur Khabibah. Jakarta : KIK Press cetakan ketiga

Conyers, Mc.Jhon. 1986. *Public Administratioan System*, New York: Appelon

Cheema, G. Shabir. And Rondinelli, D.A.2007. *Decentralizing Governance Emerging Consepts and Practices*. Brookings Institution Washington. D.C.

Cheema, G. Shabir, and Rondinelli, D.A. 1993. *Decentralization and Development : Policy Implementation In Development Countries*. Beverly Hills.Sage Publication.

Center for International Forestry Research (CIFOR) 2007. *Menuju kesejahteraan dalam masyarakat*. Buku Panduan untuk Pemerintah Daerah, CIFOR, Bogor, Indonesia.

Denzin, Norman K. dan Lincoln S. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Duncan. G. M. (1993) *A Dictionarry Of Sociology*. Routledge. London

Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: Uhaiindo dan Offset.

Fakih, Mansour. 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insistpres bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.

Fattah, Nanang. 2006. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja

Gibson, dkk.2002. *Organisasi*. Jakarta: Erlangga

Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo.

Hersey R.E. dan Blanchard R.A.T. 1990. *Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumberdaya*

- Manusia. Edisi Keempat.
Penerjemah Agus Dharma.
Jakarta:Erlangga.
- Hoessein, Bhenyamin. 2002. Kebijakan Desentralisasi.Jurnal Administrasi Negara. Vol. 1. No.02.
- Hersey R.E. dan Blanchard R.A.T. 1990. Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumberdaya Manusia. Edisi Keempat. Penerjemah Agus Dharma. Jakarta: Erlangga.
- Hoessein, Bhenyamin. 2002. Kebijakan Desentralisasi.Jurnal Administrasi Negara. Vol. 1. No.02